

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang tidak luput dari perkembangan teknologi. Pengaruh arus globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang yang masuk ke Indonesia, baik secara legal maupun yang ilegal.

Di sisi lain dari kondisi dan fenomena yang sering terjadi dimasyarakat akibat majunya perindustrian, pembangunan dan perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika adalah bentuk penipuan lewat media komunikasi dalam hal ini adalah lewat media SMS (*Short massege service*) yang sering terjadi dan dialami di masyarakat belakangan ini baik yang kemudian diungkapkan kepada publik, yang dimuat ditelevisi, yang terinvestigasi atau bahkan yang hilang begitu saja atau yang dibiarkan, yang mengakibatkan masyarakat banyak mengalami kerugian materiil dan imateriil. Hal ini tentunya sering atau biasa dilakukan oleh oknum atau kelompok sindikat kejahatan, para produsen barang atau jasa yang tidak jujur atau juga orang-orang yang kurang bertanggungjawab yang ingin mengambil keuntungan yang besar

dari masyarakat dan para konsumen yang awam atau tidak paham atas prosedur dan ketentuan hukum yang ada dan berlaku.

Disisi yang berbeda dapat dilihat bahwa keberadaan dari *Hand phone* itu sendiri sebagai salah satu alat komunikasi yang dewasa ini banyak digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia merupakan terobosan besar dalam dunia teknologi informasi. Seperti yang diketahui bahwa pada awalnya penggunaan telepon sebagai salah satu sarana komunikasi dalam dunia informasi tidak dapat dipindahkan atau statis, namun dengan adanya *Handphone* maka ada salah satu nilai tambah daya gunanya yaitu dengan dapat dibawanya *Handphone* oleh penggunanya sehingga alat komunikasi ini kemudian menjadi pemegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat saat ini yang berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan era globalisasi dunia yaitu adanya efisiensi dan efektifitas. Keadaan tersebut juga berlangsung di Indonesia, yang mana sifat konsumtif dari bangsa ini yang sangat tinggi menyebabkan *Handphone* kini dimiliki semua orang tanpa batasan umur, pada semua lapisan sosial masyarakat yang penggunanya dapat disaksikan dengan nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saat ini seluruh lapisan sosial masyarakat mulai dari lapisan sosial paling tinggi hingga masyarakat dari lapisan sosial yang terendah bisa memiliki *hand phone* karena murahnya alat komunikasi ini.

Semakin mudahnya seseorang memperoleh *Hand phone* berbanding lurus dengan semakin murahnya tarif dari berbagai kartu telepon yang disediakan

oleh *Provider* telekomunikasi, yang jika dipandang dari sisi lain berdampak pula untuk memunculkan suatu modus dari tindak pidana atau delik.

SMS merupakan salah satu fitur yang pasti ada dalam setiap kartu telepon, yang rentan menimbulkan penyalahgunaan yang bisa dimungkinkan akan menjerat baik pengirim maupun penerimanya. Contoh penyalahgunaan SMS yang bisa memungkinkan timbulnya suatu delik adalah sebagai berikut :

Slmt, No. Plgn INDOSAT anda telah memenangkan GEBYAR HADIAH Rp. 15 jt, u/ ket HUB. Call center : 081330456013. 08565646008 www.indosat.com” pengirimnya tertulis INDOSAT.

Walaupun banyaknya penyalahgunaan yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas SMS, akan tetapi keberadaannya sebagai alat bukti dalam persidangan kasus pidana masih dipertanyakan keabsahannya. Hal tersebut sangat dimaklumi dikarenakan saat pembuatan KUHAP, belum ditemukan dan terjadi kasus kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan sarana atau media telekomunikasi atau kejahatan *Cybercrime*, khususnya modus penipuan lewat pesan singkat atau SMS. Kasus-kasus yang berkaitan dengan *Cybercrime*, tentunya bukan merupakan hambatan bagi perkembangan dibidang teknologi informasi di Indonesia yang secara kasat mata sangat membantu aktifitas dan pekerjaan setiap individu, akan tetapi yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti ialah bagaimana negara memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami kasus penipuan lewat media komunikasi atau juga masyarakat yang mengalami kejahatan *Cybercrime* atau bagaimanakah

aturan hukum itu harus bisa diterapkan dalam mengantisipasi maupun memberikan perlindungan, manfaat dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna dan sekaligus ancaman hukuman yang berat bagi siapapun yang menyalahgunakan perkembangan dan kemajuan dibidang teknologi informasi dan telekomunikasi ini, agar dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, serta kenyamanan bagi masyarakat di negara Indonesia.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban secara global, disamping itu perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*Borderless*), dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung dengan cepat. Teknologi informasi kini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi arena efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu resim hukum baru yang dikenal dengan nama *Cybercrime*, yang diambil dari kata *Cyber law*. *Cyber law* adalah istilah yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang digunakan adalah hukum Teknologi informasi (*Law of information technology*), hukum dunia maya (*Virtual word law*) dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis *Virtual*. Istilah hukum siber yang digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa siber jika diidentikan dengan dunia maya akan cukup

menghadapi persoalan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai *Maya* sesuatu yang tidak terlihat dan semu.¹

Melihat fakta yang ada pada saat ini, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalahgunakan sebagai sarana kejahatan ini, menjadi sangat penting untuk diantisipasi bagaimana kebijakan hukumnya, sehingga kejahatan *Cybercrime* yang terjadi saat ini, dapat diantisipasi dengan dilakukan upaya penanggulangan lewat sarana hukum pidana, termasuk dalam hal ini mengenai sistem pembuktian. Dikatakan sangat penting karena dalam penegakan hukum pidana, dasar membenaran seorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, disamping perbuatannya dapat dipersalahkan atas kekuatan Undang-undang yang telah ada sebelumnya (Asas legalitas), juga perbuatan mana didukung oleh kekuatan bukti yang sah dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan (unsur kesalahannya).

Bertolak dari uraian diatas, apabila dikaitkan dengan *Cybercrime*, maka unsur pembuktian dengan kekuatan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana merupakan masalah yang tidak kalah pentingnya untuk diantisipasi disamping unsur kesalahan dan adanya perbuatan pidana. Akhirnya dengan melihat pentingnya persoalan pembuktian dalam *Cybercrime*, tulisan ini hendak mendeskripsikan pembahasannya dalam fokus masalah penegakan hukum terhadap kejahatan dalam dunia maya terutama melalui media SMS.

¹ <http://advokadpurwadi.blogspot.com/2009/04/kejahatan-mayantara-cyber-crime-di.html>, Jumat 12 Oktober 2012, pukul 11.00WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut ;

1. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami penipuan lewat layanan SMS (*Short message services*).
2. Apakah hukum positif yang ada dan berlaku di Indonesia saat ini dapat menanggulangi kejahatan berjenis *Cybercrime* pada umumnya dan masalah penipuan lewat SMS pada khususnya?.

C. Tujuan Penelitian :

Penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi masyarakat atau korban yang mengalami masalah yang berkaitan dengan dunia *Cybercrime*, khususnya yang berkaitan dengan penipuan lewat media telekomunikasi sehingga tulisan ini nantinya akan digunakan sebagai bahan pembelajaran atau referensi bagi masyarakat agar :

- a. Masyarakat mengetahui, memahami dan juga dapat memperjuangkan hak-haknya sebagai korban penipuan dan juga tidak melupakan kewajiban untuk mawas diri atas setiap bentuk penipuan berkedok hadiah yang pastinya sangat menggoda masyarakat awam yang tidak paham akan

akibat, dan tidak paham atas aturan hukum yang berlaku di negara ini, sehingga mereka menjadi paham akan hak dan bentuk perlindungan dari negara yang harus mereka dapatkan.

- b. Dapat menemukan dan memberikan informasi kepada semua kalangan mengenai bentuk dan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan *Cybercrime*, selain itu menganalisis mengenai implementasi ketentuan hukum *Cybercrime*, beserta ketentuan hukum lainnya, yang dapat diterapkan atas kejahatan *Cybercrime*, khususnya kejahatan dengan modus penipuan lewat pesan singkat atau SMS.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis ;

Adalah untuk melatih penulis untuk berpikir dan menyatakan buah pikirannya secara jelas dan ilmiah lewat tulisan, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuannya selain apa yang telah dididiknya di kelas saat proses pembelajaran mengenai pentingnya penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya atau *Cybercrime* dan juga bagaimana penegakan hukum terhadap korban yang mengalami kerugian materiil dan immateriil akibat kejahatan di dunia maya. Selain itu agar penulis bisa mendapatkan gelar sarjana, karena tulisan ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

2. Bagi ilmu Hukum ;

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi proses perkembangan ilmu hukum dan pembaca dapat memahami lebih baik dan jelas mengenai tindak pidana *Cybercrime* apabila hal tersebut telah dikolaborasikan dengan delik penipuan atau delik lainnya, dengan tetap berlandaskan pada prinsip hukum yang ada dan berlaku di Indonesia.

3. Bagi masyarakat luas ;

Untuk memberikan informasi dan juga wawasan akan pengetahuan mengenai tindakakan kejahatan *Cybercrime* khususnya apabila delik ini telah dipadukan dengan delik penipuan yang sering kali menimpa masyarakat yang masih buta akan pemahaman hukum dan teknologi yang belakangan ini terus berevolusi dan menimpa masyarakat awam yang lemah akan pemahaman hukum dan teknologi, sehingga dapat memberikan gambaran terkait apa yang harus dan sebaiknya dilakukan apabila masyarakat berhadapan langsung dengan permasalahan seperti ini, dan membangkitkan peran masyarakat dalam rangka ikut menegakan hukum.

4. Bagi pemerintah dan kepolisian ;

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan juga pihak kepolisian, sebagai bahan referensi untuk menjadikanya dasar atau masukan tentang pentingnya dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana *Cybercrime* dan tindak pidana lainya yang berkaiatan dengan dunia maya, telekomunikasi dan informasi.

E.Keaslian Penulisan:

Penelitian dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ATAS PRAKTEK PENIPUAN MELALUI MEDIA KOMUNIKASI LEWAT PESAN SINGKAT ATAU SMS, merupakan hasil karya asli dan bukan merupakan hasil plagiat atau mengambil alih karya orang lain atau pun menduplikasikan hasil karya orang lain. Jika tulisan ini terbukti merupakan hasil duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulisan orang lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku. Namun ada beberapa skripsi yang senada dengan tulisan saya, yakni sebagai berikut:

- 1.PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU CYBERCRIME DI INDONESIA.

Skripsi ini berasal dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum tahun 2007, yang ditulis oleh saudari Ririn Novianti Sumanda, mengemukakan sebagai berikut ;

- a. Bahwa jalur internet dapat dijadikan tempat untuk melakukan kejahatan, karena jalur internet dapat digunakan untuk melakukan kejahatan dan melanggar hukum. Disamping itu ditemukan aparat penegak hukum yang kurang menguasai teknologi komputer, dan terbatasnya teknologi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum atau bahkan belum dibangunnya kerjasama antar negara dalam bidang *Cybercrime*, padahal wilayah kejahatannya sudah sering melibatkan beberapa wilayah negara.
- b. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku *Cybercrime* di Indonesia masih sulit diterapkan dengan sanksi hukum yang sesuai dikarenakan belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang *Cyberlaw* untuk menjerat pelaku *Cybercrime* karena masih menjadi polemik hukum tentang sahnya barang bukti.

2.PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN DI DUNIA MAYA (STUDI KASUS DI POLDA DIY)

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Atmajaya Yogyakarta, Fakultas Hukum tahun 2010, oleh saudari Sri Rejeki, mengemukakan sebagai berikut ;

- a. Penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya dilakukan oleh kepolisian daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dilakukan dengan dua cara yaitu secara preventif dan represif. Secara preventif penegakan hukum ini dilakukan melalui kerjasama dengan pihak-pihak berkait seperti pengusaha warung internet (warnet) dalam hal pengawasan dan / atau pencegahan terjadinya pelanggaran / kejahatan di dunia maya.
- b. Kendala yang dihadapi oleh aparat polisi adalah dalam penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya di wilayah Polda DIY , sangat berkaitan dengan sumber daya manusia penegak hukumnya. Kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum misalnya, tidak sebanding dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan di dunia. Selain itu ketidakhadiran saksi korban juga menjadi kendala tersendiri dalam penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya oleh Polda DIY.

3. PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENYEDOTAN PULSA DENGAN SARANA HUKUM PIDANA.

Ditulis oleh saudari Fenny Anggreuyani, dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta mengemukakan sebagai berikut:

- a. Di Indonesia belum ada hukum pidana positif yang mengatur secara khusus kejahatan penyedotan pulsa. Namun demikian, hukum pidana positif yang ada dapat diterapkan terhadap kejahatan penyedotan pulsa.
- b. Terhadap kasus kasus kejahatan penyedotan pulsa yang terjadi saat ini, aparat penegak hukum, menerapkan peraturan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (1), huruf a, jo Pasal 62 Undang-undang nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, Pasal 362 sampai Pasal 378 KUHP. Ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam hukum pidana akan digunakan, apabila penanggulangan kejahatan penyedotan pulsa dengan sanksi administratif tidak berjalan efektif atau lancar.

F.Batasan Konsep :

Penulis akan terlebih dahulu akan menguraikan pengertian,defenisi,atau pernyataan mengenai perlindungan hukum kepada masyarakat atas praktek penipuan lewatmedia komunikasi dalam bentuk pesan singkat atau SMS .

1. Perlindungan hukum ;

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud Perlindungan adalah cara proses, perbuatan melindungi.² Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.³

2. Masyarakat ;

Masyarakat merupakan orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan, yang tersebar dengan perasaan persatuan yang sama, sebagai suatu struktur atau aksi yang dibatasi dengan norma dan nilai.

3. Hadiah ;

Pemberian kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan ;

- a). Memperoleh ganjaran karena memenangkan suatu perlombaan ;
- b). Panitia menyediakan uang dan piala bagi pemenang.

4. Media ;

Secara Bahasa, Kata Media berasal dari bahasa Latin *Medius* yang berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk

² Kamus besar bahasa Indonesia.

³ <http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2170965-pengertian-perlindungan-hukum/>

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat .

5. Komunikasi ;

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain). Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.

6. Media komunikasi ;

Media komunikasi merupakan semua sarana yang dipergunakan untuk memproduksi, mendistribusikan, atau menyebarkan dan menyampaikan informasi. Media komunikasi sangat berperan dalam kehidupan masyarakat. Proses pengiriman informasi di zaman ini sangat canggih. Teknologi komunikasi sangat dicari untuk menyampaikan atau mengirim informasi yang semakin berkembang cepat, tepat, akurat, mudah, murah, efektif dan efisien, bahkan antar pulau atau negara dan batas pun semakin tidak terasa karena media komunikasi yang sangat berkembang pesat belakangan ini.

7. SMS ;

Short Message Service (SMS) adalah suatu fasilitas untuk mengirim dan menerima suatu pesan singkat berupa teks melalui perangkat nirkabel,

yaitu perangkat komunikasi telepon selular, dalam hal ini perangkat nirkabel yang digunakan adalah telepon selular.⁴

8. Penipuan ;

Menurut defenisi dari Pasal 378 KUHP, penipuan adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberikan hutang, maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan.

G. Metode Penelitian Hukum :

a. Jenis penelitian ;

Sehubungan dengan judul penelitian di atas, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan apakah hukum yang diterapkan atau diimplementasikan telah sesuai, untuk menyelesaikan perkara atau masalah tertentu khususnya yang berkaitan dengan penipuan lewat media komunikasi dalam bentuk pesan singkat atau SMS atau juga *Cybercrime*. Penelitian normatif ini, menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data yang utama.

1) Sumber data ;

⁴ <http://globalonlinebook.blogspot.com/2009/09/pengertian-sms.html>.

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data yang terdiri dari ;

a. Bahan hukum primer ;

1. Ketentuan Pasal 378 , tentang penipuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-undang nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
3. Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK).

b. Bahan Hukum sekunder meliputi ;

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

c. Bahan Hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus Bahasa Hukum.

2. Metode pengumpulan data ;

a). Wawancara ;

Wawancara dilakukan dengan Narasumber di wilayah POLDA Yogyakarta, yaitu Bapak Komisaris Polisi Rianto, S.H, bertindak sebagai Kepala unit B, Subdit III pidana tertentu (Pidter), Ditreskrimsus Polda DIY.

b). Studi kepustakaan ;

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku atau tulisan yang berkaitan dengan masalah penipuan lewat media komunikasi dalam hal ini penipuan lewat pesan singkat dan *Cybercrime*.

3. Metode analisis data ;

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir bernalar digunakan secara deduktif. Pola pikir ini, menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat khusus, dengan menggunakan penalaran.

H . Sistematika Penulisan Hukum

Dalam sub bab ini penulis akan menjelaskan mengenai sistematika penulisan Skripsi ini yang mana ;

Dalam BAB I, Penulis membahas mengenai Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Batasan konsep, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan hukum.

Dalam BAB II, Penulis menjelaskan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat yang diberikan oleh negara dalam rangka memberikan atau mengimplementasikan asas nasional pasif dari hukum nasional yaitu memberikan perlindungan hukum atas praktek penipuan lewat media komunikasi dalam bentuk pesan singkat atau SMS, dan upaya pencegahan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

BAB III, Penulis akan membahas mengenai kesimpulan dan saran terhadap upaya penyelesaian kasus dan perlindungan hukum bagi korban, yang akan dijabarkan sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap ketentuan, pendapat para ahli atau sarjana, dan hasil wawancara dengan narasumber yang berkompeten dalam bidang *Cybercrime*, atau secara khusus kasus penipuan lewat media komunikasi dalam bentuk pesan singkat atau SMS tersebut .

